



RENJA

RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mempunyai arti yang penting dan strategis karena pada tahun tersebut merupakan Tahun Ketiga Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Pemerintahan Terpilih Yang Telah Ditetapkan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026.

Dengan mengacu pada Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023, dengan mempertimbangkan capaian Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) pendidikan yang menjadi tolak ukur dalam menentukan arah yang ingin dicapai. Serta juga meningkatkan dan mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seuruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dengan menjamin keterserapan lulusan di dunia kerja serta mampu meningkatkan kemampuan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan harapan dalam visi RPJMD 2021-2026. Selain itu perhatian yang lebih besar akan diberikan pada peningkatan mutu Pendidikan, terutama pada mutu dan kualitas Guru, penyediaan sarana Laboratorium yang mencukupi, Peningkatan Mutu Lulusan di semua jenjang Pendidikan, Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha, Pemantapan Pelaksanaan Kurikulum merdeka sejak ditetapkan mulai tahun 2020 dan Pelayanan terhadap Kelompok Marginal didaerah 3T, Sehingga rencana kerja Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 digunakan sebagai dasar dan pedoman bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Penyusunan Rencana/Program Pembangunan dimasing-masing Bidang, UPT dan Cabang Dinas sekaligus sebagai pedoman penyusunan Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, aspek prioritas, aspek perimbangan kewenangan pusat dan daerah,



terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek teknis perencanaan strategis, serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata bidang pendidikan dan kebudayaan dewasa ini baik pusat maupun daerah. Selain itu, Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan seluruh unit kerja, yang memuat perkiraan target-target pencapaian dalam satu tahun, dan diharapkan dapat memberi arah, acuan dan pedoman dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten, sekolah, lembaga pendidikan lainnya, serta masyarakat umumnya

Rencana Kerja (Renja) ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta para pemangku kepentingan pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan dan Kebudayaan secara sinergis dan berkesinambungan.

Semoga apa yang disajikan dalam Rencana Kerja ini dapat memberikan tuntunan, manfaat didalam rangka pembangunan pendidikan dan Kebudayaan dimasa mendatang untuk **meciptakan Sumberdaya Manusia Mandiri Yang Berdaya Saing. AMIEN....!**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M. Kes

PEMBINA TINGKAT I/IVb
NIP. 196707121990032013



DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	17
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	23
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	35
3.3	Program dan Kegiatan	35

BAB IV : PENUTUP



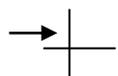
1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara telah diamanatkan oleh konstitusi. Hak setiap warga negara tersebut diikuti dengan ketentuan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, memberdayakan semua warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan diharapkan dapat menjamin Ketersediaan Layanan Pendidikan, Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan, Meningkatkan Kualitas Dan Relevansi Pendidikan, Mewujudkan Kesetaraan Bagi Semua Warga Negara Dalam Layanan Pendidikan Dan Menjamin Kepastian Layanan Pendidikan.

Tahun 2023 merupakan tahun ke ketiga era kepemimpinan baru kepala daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan untuk mencapai target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

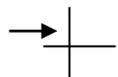


2021 - 2026. Permasalahan dan hambatan tersebut secara umum berkaitan dengan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, disusunlah dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara teknis, proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Sehingga kewajiban bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun suatu sistem manajemen pemerintahan yang *Transparan, Efektif, Efisien Dan Akuntabel* dalam proses pelaksanaan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program serta kegiatan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut



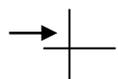
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Disatu sisi perencanaan juga merupakan suatu proses yang menghasilkan dokumen rencana. Dokumen Rencana kerja ini akan berfungsi sebagai peta untuk mencapai suatu tujuan dengan indikator pencapaian yang disepakati bersama oleh seluruh pihak. Proses menyusun rencana kerja merupakan usaha merencanakan langkah-langkah strategis dalam jangka menengah bagi setiap OPD. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renja-OPD atau perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, yang disusun dengan berpedoman atau selaras dengan Renstra OPD yang tentu juga merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah 2021-2026.

Sejalan dengan itu, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai salah satu unsur perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berkewajiban untuk menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan, melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di Kabupaten/Kota, dalam hal ini dengan mempertimbangkan masukan dan potensi-potensi kekuatan disetiap Renstra OPD Dinas Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dan partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pada akhirnya, Rencana Kerja (Renja) Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Program Tahunan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi

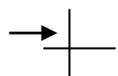


Tengah, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, serta acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

RENJA-OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, disusun berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, Pancasila sebagai landasan adil dan landasan operasional berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

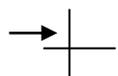


11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (berita negara republik indonesia tahun 2013 nomor 822);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah Periode 2021-2026;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor :486);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Dinas, Unit Pelaksana Badan dan Cabang Dinas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud yang ingin dicapai dari rumusan RENJA ini sebagai berikut :

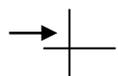
- a. Tersusunnya dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang taktis strategis dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.
- b. Tersusunnya rencana kegiatan peningkatan jumlah, mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- c. Tersusunnya rencana kegiatan perluasan peluang dan bantuan secara selektif terhadap sumber daya manusia untuk melanjutkan pendidikan S1, S2 dan S3.
- d. Tersusunnya rencana kegiatan peningkatan pembinaan mental spiritual (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara mandiri dan melembaga.



- e. Tersusunnya rencana kegiatan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
- f. Tersusunnya rencana kegiatan Pendayagunaan teknologi Komunikasi dan Informasi untuk pembelajaran
- g. Tersusunnya rencana kegiatan Penilaian pendidikan
- h. Tersusunnya rencana dan kegiatan kebudayaan .
- i. Tersediannya dokumen tentang informasi nilai-nilai sejarah, kesenian dan kepercayaan terhadap TYE serta potensi budaya di provinsi Sulawesi Tengah

Adapun Tujuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
- b. Renja sebagai dokumen yang berisikan Program-program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.



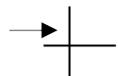
2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

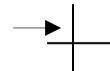
Rencana Kinerja 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Statejik (Renstra) 2021-2026. Sesuai dengan Rencana Kinerja 2022, maka dalam periode ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mendapatkan anggaran biaya sebesar : **Rp. 1.660.909.637.266,-**. (satu milyar enam ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

Capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut :



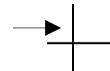
DATA CAPAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu	Realisasi			SILVA
			Keu		Fis	
			Rp.	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Total Keseluruhan	1,660,909,637,266	1,506,084,318,812	90.68	93.23	153,581,074,082
	Belanja Pegawai / Gaji	611,126,388,156	534,609,433,366	87.48	87.48	76,516,954,790
		1,042,553,773,798	965,003,000,320	86	95.92	76,592,098,556
	SEKRETARIAT	714,941,148,182	674,269,366,043	86	95.92	40,569,559,339
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	- Kegiatan :					
	- Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,380,923,200	16,343,258,480	100	99.99	37,664,720
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,633,291,783	13,531,068,983	99	99.25	
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300,000,000	289,700,000	97	100.00	10,300,000
	- Sub. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	353,146,725	341,646,725	97	100.00	11,500,000
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,264,165,200	1,248,202,669	99	100.00	15,962,531
	- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	682,805,975	669,657,500	98	96.83	13,148,475
	- Sub. Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,949,996,550	1,303,323,270	67	100.00	646,673,280
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bancunan Lainnya	799,999,750	669,223,800	84	100.00	130,775,950
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285,400,500	267,460,000	94	100.00	17,940,500



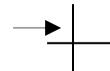
RENCANA KERJA (RENJA)
OPD

1	2	3	4	5	6	7
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,335,250,348	7,253,047,029	99	100.00	82,203,319
	- Sub. Kegiatan : DANA BOS	671,956,168,151	632,352,777,587	94	99.99	39,603,390,564
	BIDANG PEMBINAAN SMA	115,699,421,883	112,112,379,520	96.9	97.27	3,294,559,051
	- Sub. Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	799,999,850	791,546,146	98.9	100.00	8,453,704
	- Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90,877,055,000	88,493,336,000	97	97.38	2,383,719,000
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15,020,000,000	14,593,810,000	97	100.00	133,706,688
	- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	5,573,139,275	4,966,512,727	89	90.02	606,626,548
	- Sub. Kegiatan : Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,478,696,648	1,429,698,412	97	96.69	48,998,236
	- Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	488,221,233	475,562,750	97	82.45	12,658,483
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah	324,747,500	323,205,249	100	99.86	1,542,251
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	172,562,577	91,602,675	53	53.08	80,959,902
	- Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMA)	964,999,800	947,105,561	98	100.00	17,894,239
	BIDANG PKLK	17,514,648,713	16,876,365,315	96.36	98.09	624,804,298
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	366,508,200	366,474,000	100	100.00	34,200
	- Sub. Kegiatan : Pengembangan karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Khusus	376,720,600	369,856,501	98	100.00	6,864,099
	- Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bidang PKLK)	100,000,000	99,959,550	100	100.00	40,450
	- Sub. Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	192,388,350	190,187,350	99	98.86	2,201,000



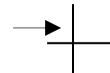
**RENCANA KERJA (RENJA)
OPD**

1	2		3	4	5	6	7
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bidang PKLK)	173,085,925	170,076,925	98	100.00	3,009,000
	-	Sub. Kegiatan : Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Bidang PKLK)	224,326,500	220,674,300	98	100.00	3,652,200
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1,030,628,850	1,017,149,750	99	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bidang PKLK)	3,626,250,000	3,376,086,750	93	100.00	250,163,250
	-	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Bidang PKLK)	281,341,288	265,860,040	94	94.50	15,481,248
	-	Sub. Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK)	10,918,355,000	10,601,316,149	97	97.10	317,038,851
	-	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK)	225,044,000	198,724,000	88	100.00	26,320,000
BIDANG PEMBINAAN SMK			185,557,814,600	153,761,365,885	82.86	82.86	31,796,448,715
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	788,671,675	765,556,600	97	100.00	23,115,075
	-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,199,365,650	1,190,482,786	99	100.00	8,882,864
	-	Sub. Kegiatan : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	638,917,600	627,407,030	98	100.00	11,510,570
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMK)	1,139,172,900	1,132,479,400	99	100.00	6,693,500
	-	Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK	341,169,575	324,659,575	95	100.00	16,510,000
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	558,829,975	521,499,250	93	99.49	37,330,725



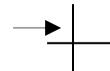
RENCANA KERJA (RENJA) OPD

1	2	3	4	5	6	7
-	Sub. Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)	3,248,652,500	3,234,781,450	100	100.00	13,871,050
-	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas (Pembinaan SMK)	1,367,363,000	1,361,722,740	100	100.00	5,640,260
-	Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pembinaan SMK)	695,311,000	693,062,950	100	100.00	2,248,050
-	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah (Pembinaan SMK)	330,832,875	310,903,886	94	49.53	19,928,989
-	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)	1,431,070,000	1,421,881,500	99	100.00	9,188,500
-	Sub. Kegiatan : Pembangunan Ruang Praktik Siswa (DAK Pembinaan SMK)	173,818,457,850	142,176,928,718	82	81.80	31,641,529,132
UPT TAMAN BUDAYA DAN PERMUSEUMAN		3,513,441,445	3,055,896,618	86.98	100.00	114,940,997
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492,286,388	429,591,371	87	100.00	62,695,017
-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89,375,000	73,408,860	82	100.00	15,966,140
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125,819,517	125,719,000	100	100.00	100,517
-	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,354,250	198,198,008	99	100.00	1,156,242
-	Sub. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1,902,595,840	1,559,949,374	82	100.00	42,636
-	Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	335,861,650	319,446,665	95	100.00	16,414,985
-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	368,148,800	349,583,340	95	100.00	18,565,460
CABANG DINAS WILAYAH I		538,997,815	527,124,000	97.80	100.00	11,873,815
-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	187,486,000	175,735,000	94	100.00	11,751,000
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189,533,665	189,411,000	100	100.00	122,665



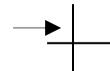
RENCANA KERJA (RENJA) OPD

1	2		3	4	5	6	7
	-	Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	75,840,500	75,840,500	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (smk)	4,200,000	4,200,000	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	81,937,650	81,937,500	100	100.00	150
CABANG DINAS WILAYAH II			633,999,600	628,473,985	99.13	100.00	5,525,615
	-	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	43,731,675	43,731,675	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,620,000	49,620,000	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,908,025	172,393,685	97	100.00	5,514,340
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA	206,996,575	206,996,575	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMK	155,743,325	155,732,050	99.99	100.00	11,275
CABANG DINAS WILAYAH III			475,999,700	474,566,450	100	100.00	1,433,250
	-	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	47,385,625	47,385,625	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	82,040,000	82,040,000	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227,311,825	225,878,575	99	100.00	1,433,250
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA	58,284,825	58,284,825	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMK	60,977,425	60,977,425	100	100.00	-
CABANG DINAS WILAYAH IV			432,999,800	432,964,600	100	100.00	35,200
	-	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	52,907,700	52,907,700	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	55,880,000	55,880,000	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135,131,850	135,096,650	100	100.00	35,200
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA	95,886,100	95,886,100	100	100.00	-



**RENCANA KERJA (RENJA)
OPD**

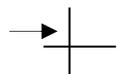
1	2		3	4	5	6	7
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMK	93,194,150	93,194,150	100	100.00	-
	CABANG DINAS WILAYAH V		1,160,037,507	992,191,923	86	100.00	167,845,584
	-	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	621,037,750	621,037,750	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,643,375	25,643,775	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	127,790,400	73,835,200	58	100.00	53,955,200
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159,275,048	159,275,048	100	100.00	-
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126,290,934	18,300,150	14	100.00	107,990,784
	-	Sub. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50,000,000	44,100,000	88	100.00	5,900,000
	-	Sub. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	50,000,000	50,000,000	100	100.00	-
	CABANG DINAS WILAYAH VI		473,999,445	360,667,550	76.09	78.48	170,366,275
	-	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30,120,000	28,830,000	96	100.00	59,910,625
	-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	46,380,000	45,100,000	97	100.00	57,340,625
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,006,375	-	-	-	45,638,125
	-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185,372,820	181,565,550	98	100.00	2,528,650
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	55,060,125	52,586,000	96	100.00	2,474,125
	-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	55,060,125	52,586,000	96	100.00	2,474,125



Berbagai Program dan kegiatan yang ditargetkan Kinerjanya di Tahun 2022, dilaksanakan untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, berdasarkan Misi pemerintah Daerah maka dituangkan pada Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Dengan tercapainya target kinerja sasaran tersebut, diharapkan akan mendorong akselerasi/percepatan terwujudnya visi dan misi pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya penjabaran rencana kerja tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2022, implementasi Rencana kerja Tahun 2022, Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2022			KONDISI AKHIR RPJMD (2026)
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	13.77	13.77	100.00	15.28
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9.42	9.42	100.00	14.85
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA	APK SMA	85.50	85.50	100.00	88.00
			APM SMA	66.50	66.50	100.00	69.00
			Angka Kelulusan (AL) SMA	97.75	97.75	100.00	99.00
			Angka Putus Sekolah SMA	2.25	2.25	100.00	1.00
			Persentase SMA berakreditasi minimal B	35.00	35.00	100.00	60.00
			Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.25	100.00	70.50
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMK	APK SMK	85.50	85.50	100.00	88.00
			APM SMK	66.50	66.50	100.00	69.00
			Angka Kelulusan (AL) SMK	97.75	97.75	100.00	99.00



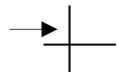
RENCANA KERJA (RENJA) OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2022			KONDISI AKHIR RPJMD (2026)
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Putus Sekolah SMK	2.25	2.25	100.00	1.00
			Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	35.00	35.00	100.00	60.00
			Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.25	100.00	70.50
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khusus	APM SLB/Paket C	66.25	66.25	100.00	66.50
			APK SLB/Paket C	74.25	74.25	100.00	75.50
			Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	17.00	17.00	100.00	22.00
		Meningkatnya Kualifikasi Dan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Persentase guru di SMA bersertifikasi	47.50	47.50	100.00	50.00
			Persentase guru di SMA berkualifikasi S1	47.50	47.50	100.00	50.00
			Persentase guru di SMA berkualifikasi S2	47.50	47.50	100.00	50.00
			Persentase guru di SMK bersertifikasi	47.50	47.50	100.00	50.00
			Persentase guru di SMK berkualifikasi S1	47.50	47.50	100.00	50.00
			Persentase guru di SMK berkualifikasi S2	47.50	47.50	100.00	50.00
			Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	47.50	47.50	100.00	50.00
			Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	47.50	47.50	100.00	50.00
		Meningkatnya Jumlah Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase perizinan SMA Swasta	50.00	50.00	100.00	75.00
			Persentase perizinan SMK Swasta	50.00	50.00	100.00	75.00



RENCANA KERJA (RENJA) OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	2022			KONDISI AKHIR RPJMD (2026)
				TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase perizinan SLB Swasta	50.00	50.00	100.00	75.00
		Meningkatnya Kualitas Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Bahasa Dan Sastra Daerah yang dilestarikan	35.00	35.00	100.00	60.00
2	Meningkatnya indeks pembangunan kebudayaan		Indeks pembangunan kebudayaan (IPK)	48.44	48.44	100.00	48.96
		Meningkatnya Ekonomi Budaya	% penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni sebagai sumber penghasilan	65.00	65.00	100.00	90.00
			Pembinaan dan Pengelolaan Seni Budaya, dan Perfilman	65.00	65.00	100.00	90.00
		Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	65.00	65.00	100.00	90.00
			% penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong	65.00	65.00	100.00	90.00
		Meningkatnya Warisan Budaya	% CB yang telah ditetapkan	25.00	25.00	100.00	50.00
			% WB yang telah ditetapkan	25.00	25.00	100.00	50.00
			Peningkatan dan Pengelolaan Museum	8.500 koleksi BCB	8.500 koleksi BCB	100.00	8.500 koleksi BCB
			% penduduk (10 th) ke atas yg menggunakan bahasa daerah	25.00	25.00	100.00	50.00
			% penduduk >10 th menonton pertunjukkan seni	25.00	25.00	100.00	50.00
			% penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah	25.00	25.00	100.00	50.00
			% RT menggunakan produk tradisional	25.00	25.00	100.00	50.00
		Meningkatnya Ekspresi Budaya	% penduduk >10 th yg terlibat pelaku pertunjukkan seni	65.00	65.00	100.00	90.00
			% RT menyelenggarakan upacara adat	65.00	65.00	100.00	90.00
			Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0.88	0.88	100.00	2.50
		Meningkatnya Budaya Literasi	% penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	65.00	65.00	100.00	90.00
			% penduduk >10 th yg mengunjungi perpustakaan/TBM	65.00	65.00	100.00	90.00



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) berimplementasi terhadap Perubahan ke - 2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait dengan UPT dan Cabang Dinas.

Merujuk terhadap perubahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi.

Menjelaskan :

Pada Bab III Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Pasal 3 ayat (2) Poin d Sub Point (1) menjelaskan bahwa “ *DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan* “

- 2) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

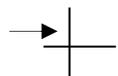
Menjelaskan :

Pada Bab III tentang Susunan Organisasi, Bagian Kedua tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 4 ayat :

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan Dinas Daerah Tipe A;

(2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pembinaan SMA :



1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA.
- d. Bidang Pembinaan SMK :
1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) :
1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK.
- f. Bidang PTK dan Tugas Pembantuan :
1. Seksi PTK SMA;
 2. Seksi PTK SMK dan PKPLK;
 3. Seksi Tugas Pembantuan.
- g. Bidang Kebudayaan :
1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang maha Esa;
 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya;
 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
- h. UPT Dinas;
- i. Cabang Dinas:
- j. Satuan Pendidikan Formal;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktruk Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3) Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas, yang merupakan pengganti terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Dinas, Unit Pelaksana Badan dan Cabang Dinas.

Menjelaskan :

- Pada Bab II tentang Pembentukan

a) Pasal 3 Point e :

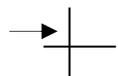
UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri dari :

1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (UPT TKIP) Kelas B;
2. UPT Taman Budaya Dan Museum Sulawesi Tengah Kelas A.

b) Pasal 5 ayat (2) :

Cabang Dinas meliputi 6 wilayah sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Satu (I) Kelas A Meliputi Kota Palu, Kabupaten Sigi berkedudukan di Kota Palu;
2. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Dua (II) Kelas A Meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Mautong;
3. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Tiga (III) Kelas A Meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di Kabupaten Poso;
4. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Empat (IV) Kelas A Meliputi Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara yang berkedudukan di Kabupaten Morowali;
5. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Lima (V) Kelas A Meliputi Kabupaten Banggai Luwuk, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Kabupaten Banggai;



6. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Enam (VI) Kelas A Meliputi Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol yang berkedudukan di Kabupaten Toli Toli.
- Pada Bab III tentang Susunan Organisasi, Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Paragraf 5 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 10 ayat :
 - (1) Susunan Organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (UPT TKIP) sebagai berikut :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (2) Susunan Organisasi UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah sebagai berikut :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelestarian dan Pengembangan
 4. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Pada lampiran LXXVI sampai Lampiran LXXXI susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sampai Wilayah VI sebagai berikut :
 - a) Kepala;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pembinaan SMA;
 - d) Seksi Pembinaan SMK;
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan Struktuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Suawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Suawesi Tengah



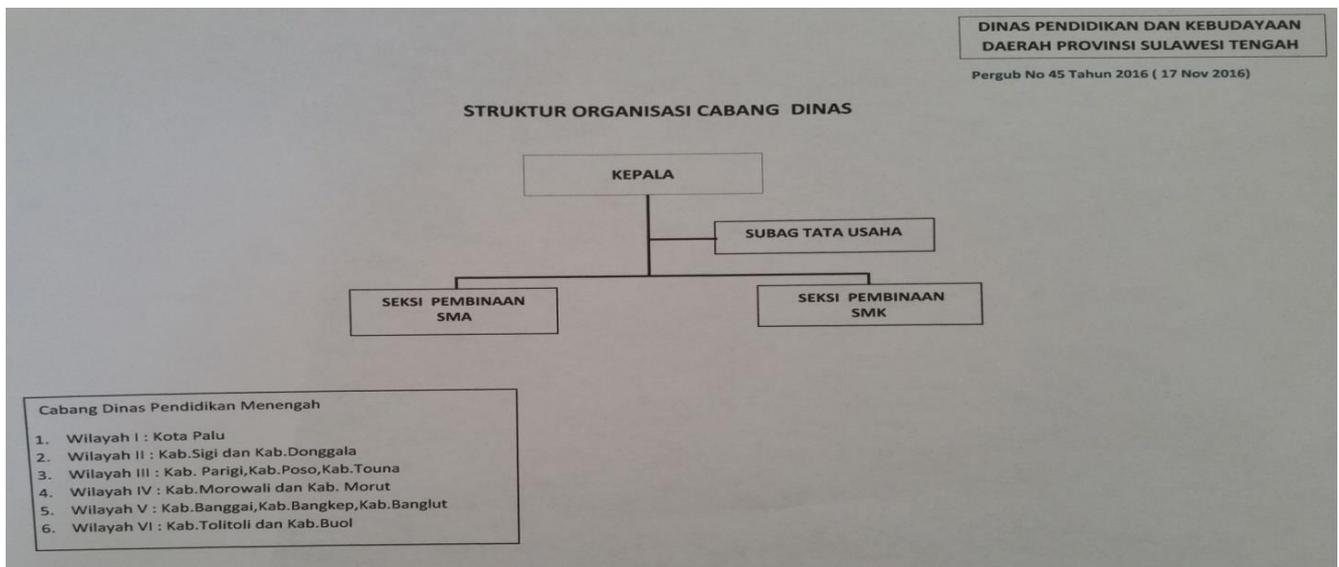
Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi UPT Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Suawesi Tengah



Gambar 3
Bagan Struktur Organisasi UPT Museum
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 4
Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

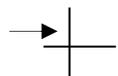
Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersediaan SDM dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja

Tantangan

- Keterbatasan kemampuan daerah dalam pengelolaan pendidikan
- Kurangnya penyediaan kesempatan belajar pada pendidikan dasar, khususnya SMP atau satuan pendidikan yang sederajat
- Dampak globalisasi dan masuknya sumber daya manusia berkualitas dari luar Sulawesi Tengah, sehingga sumberdaya manusia Sulawesi Tengah menjadi kalah dalam persaingan global di wilayah Sulawesi Tengah.
- Menurunnya semangat kerja pendidik, karena sarana prasarana penunjang kurang memadai
- Adanya pengaruh negatif budaya dari luar
- Angka melanjutkan lulusan SMA ke perguruan tinggi masih rendah.
- Semakin maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik, serta tindak kejahatan lainnya yang melibatkan anak usia sekolah.
- Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa dan mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah jatidiri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya.

Peluang

- Melalui otonomi daerah, memberikan kesempatan untuk membuka jaringan kerja (networking) dengan pihak-pihak di luar Sulawesi Tengah baik pada lingkup nasional maupun internasional
- Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 Dinas Pendidikan Propinsi Sulteng memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik
- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak
- Terdapat berbagai perguruan tinggi, yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- Wilayah Geografis Provinsi Sulawesi Tengah yang terpencar dan terpencil
- Adanya komitmen pemerintah menjadikan Sektor Kebudayaan
- Kondisi keamanan daerah Sulawesi Tengah semakin kondusif pasca kerusuhan Poso.
- Meningkatnya minat masyarakat internasional untuk mengadakan kunjungan/penelitian terhadap Benda-benda Cagar Budaya;
- Makin matangnya tingkat kehidupan berdemokrasi, sehingga membuka kesempatan besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni
- Dukungan pemerintah kabupaten terhadap pendidikan dan Kebudayaan cukup tinggi.
- Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan;
- Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan, serta Pengelolaan Manajemen dan Pencitraan Publik;
- Adanya dukungan dari Implementasi anggaran pendidikan sebesar 20% oleh pemerintah sesuai tuntutan Undang-undang;
- Tersedianya petunjuk standard pelayanan pendidikan;
- Tersedianya sarana prasarana kependidikan yang memadai;



- Kualitas dan kuantitas guru yang tersebar secara merata disemua jenjang pendidikan pada satuan pendidikan;
- Kesadaran tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi tinggi;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Program	Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan penunjang Program Prioritas
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Program dan Kegiatan Prioritas telah terlaksana sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada urusan Pembinaan SMA, SMK dan SLB
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	



3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlaksana sesuai dengan Nomenklatur yang ditetapkan
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Pengembangan Kebudayaan masih banyak Indikator Capaian yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan penganggaran sehingga dilaksanakan sesuai dengan Sub Kegiatan
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Pro	
5	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	

3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal dan khasanah kebudayaan nusantara, yang memberi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar.

Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatif baru di bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi tetapi juga memajukannya dengan cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan.

Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM akan mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2016-2020), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Nawacita serta Kebijakan RPJMD dalam berbagai program kerja prioritas, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Memasuki periode selanjutnya (2021-2026), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kembali mengelola sektor pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Pertama, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.



Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya.

Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, sesuai arahan Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuh kembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, serta kebijakan Kemendikbud, tentang Merdeka Belajar, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.



Selain berbagai potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus diatasi dalam kurun waktu 2021-2026.

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan (APM), khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar. Namun, jika dilihat dari pemerataan akses masih terdapat disparitas antar kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya APK atau APM yang cukup lebar pada semua jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota.

Salah satu permasalahan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan erat dengan akses adalah banyaknya anak putus sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pada jenjang pendidikan menengah. Salah satu penyebab terjadinya anak putus sekolah adalah kemiskinan. Kebijakan terobosan seperti penyediaan dana BOS dan beasiswa miskin secara massal telah terbukti dapat menurunkan angka putus sekolah tersebut.

Disparitas juga terjadi pada indikator pendidikan lainnya, seperti persentase guru SD berkualifikasi S-1/D-4. Disparitas berbagai indikator kinerja pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Sebab itu, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu dilaksanakan secara konsekuen

Disparitas tersebut mungkin selama ini tidak disadari oleh pemerintah daerah karena dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya tidak pernah dicantumkan kewajiban pemerintah daerah dalam pencapaian target atau sasaran kinerja pembangunan pendidikan. Masih dalam aspek akses pendidikan, kesenjangan partisipasi pendidikan masih terjadi antara penduduk miskin dan penduduk kaya.

Hal ini berarti bahwa kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk kelompok termiskin masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk kelompok terkaya. Kebijakan pendanaan massal seperti BOS, beasiswa miskin, BKM, BOM telah terbukti dapat mengurangi disparitas partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dan penduduk kaya tersebut. Karena itu, kebijakan pendanaan massal perlu dilanjutkan di masa datang dengan mekanisme dan metode penyaluran yang lebih baik.

Disparitas dalam kesempatan memperoleh pendidikan juga terjadi antara penduduk yang tinggal di perdesaan dan penduduk yang tinggal di perkotaan. Sebab itu, kebijakan terobosan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal yang telah dilaksanakan selama



kurun waktu lima tahun terakhir perlu dilanjutkan dengan menitikberatkan pembangunan pada kabupaten dengan angka partisipasi pendidikan yang relatif masih rendah, dan dengan memperhatikan disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan hingga ke daerah terpencil.

Meski belum memiliki data akurat, diprediksi bahwa rasio Angka Partisipasi Murni (APM) siswa perempuan terhadap APM siswa laki-laki pada setiap jenjang pendidikan masih terdapat kesenjangan. Jadi, pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga perlu memperhatikan upaya pengurang-an disparitas antargender.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya mutu pendidikan. Meski dalam berbagai olimpiade nasional beberapa peserta dari Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil mengukir prestasi dengan meraih medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu indikator mutu yang tinggi, tetapi secara global, mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih termasuk rendah. Pada level nasional, kualitas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi lain terutama provinsi yang ada di wilayah pulau jawa.

Permasalahan pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian adalah mutu tenaga pendidik. Lemahnya sistem remunerasi bagi pendidik ditengarai berakibat terhadap mutu pendidikan karena mutu pendidikan sangat bergantung pada mutu pendidik. Selain itu banyak ditemukan kasus guru yang mengajar di luar bidang keahliannya (*mismatch*) karena keterbatasan jumlah guru khususnya di daerah perdesaan, terpencil dan tertinggal. Karena itu, Pemerintah, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengembangkan program sertifikasi guru. Program tersebut sekaligus menjawab tuntutan perbaikan remunerasi. Namun, dalam program sertifikasi tersebut belum ada kajian tentang korelasi peningkatan profesi guru dengan peningkatan mutu pendidikan yang dicirikan dari nilai UN.

Permasalahan lain dalam hal guru adalah disparitas distribusinya. Jika ditinjau secara keseluruhan rasio siswa/guru sudah sangat baik, tetapi disparitas antar kabupaten/kota masih cukup lebar, bahkan di daerah terpencil masih banyak satuan pendidikan khususnya SD yang hanya memiliki satu atau dua orang guru. Karena itu, penerapan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota perlu lebih dipertegas dalam kurun waktu lima tahun ke depan.



Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang mendapat porsi anggaran terbesar dalam APBN dan APBD sesuai dengan tuntutan konstitusi. Dari tahun ke tahun, anggaran fungsi pendidikan dalam APBN meningkat secara nyata. Namun dengan dimasukkannya komponen gaji dalam ketentuan 20% tersebut berakibat pada menurunnya persentase anggaran pendidikan di banyak kabupaten/kota. Di beberapa daerah bahkan persentase gaji guru dan tunjangan lainnya saja sudah hampir mencapai 20% sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan lain tidak tersedia.

Kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan perkembangan kurikulum tersebut, antara lain dikenal Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2006, dan terakhir Kurikulum 2013. Pada masa lalu, kurikulum pendidikan syarat dengan materi tambahan yang tidak ada atau sangat sedikit kaitannya dengan proses pembelajaran yang sesuai dengan proses tumbuh kembang anak. Meski kehadiran kurikulum 2013 telah meng-akomodir hampir seluruh kekurangan dan kelemahan kurikulum sebelumnya, tetapi penerapannya di sekolah masih menuai banyak hambatan, terutama ditinjau dari aspek kompetensi guru untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan dalam penciptaan manajemen pelayanan pendidikan yang efektif dan efisien belum optimal. Selain itu, belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen tinggi untuk menyediakan anggaran pendidikan yang memadai. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan serta belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian

Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang merupakan representasi masyarakat perlu ditingkatkan. Diharapkan, dengan berlakunya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat memperjelas tugas, peran dan tanggung jawab setiap jenjang pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan.

Salah satu permasalahan yang cukup kronis adalah ketersediaan data pada saat yang tepat. Tersedianya data yang akurat pada saat yang tepat merupakan syarat utama dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan. Namun, persoalan pendataan tersebut masih merupakan titik lemah dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian di masa datang. Keberadaan Pusat Data dan Statistik



Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berperan cukup besar dalam membantu mengatasi permasalahan ini bagi kepentingan pem-bangunan pendidikan di daerah.

Implementasi sebuah kebijakan dengan tujuan yang sangat baik dapat berakibat kontra-produktif bila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang tepat. Kebijakan tentang program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru menjadi salah satu contoh nyata yang terjadi saat ini. Dengan harapan memperoleh kualifikasi akademik S1/D4 dan atau lolos sertifikasi untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan, tidak sedikit guru yang lebih fokus pada aktivitas tersebut dengan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah. Permasalahan lain menyangkut kinerja guru adalah rendahnya komitmen guru dalam melaksanakan tugas profesi. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan upaya peningkatan mutu guru melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru tidak akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan pendidikan di daerah terpencil akan menjadi lebih sulit dengan tiadanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana prasarana pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi dan telekomunikasi, di samping sarana pendukung lainnya. Demikian pula ketidakselarasan berbagai pembangunan bidang lain dengan pembangunan bidang pendidikan merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan pembangunan pendidikan yang berkeadilan.

Rendahnya daya saing pendidikan antar wilayah kabupaten/kota juga perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan pendidikan ke depan. Keberadaan sekolah unggulan masih didominasi oleh daerah perkotaan, atau belum menyebar di beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka kecenderungan penumpukan siswa di daerah perkotaan akan semakin tinggi, yang akan berdampak pada semakin tingginya disparitas APK antar wilayah kabupaten/kota.

Dalam hal tata kelola pendidikan, masih ada peluang bagi sebagian anggaran yang belum sepenuhnya dibelanjakan secara efektif dan efisien. Hal ini, antara lain karena masih adanya orientasi proyek pada sebagian pengelola pembangunan pendidikan. Anggapan bahwa penyerapan anggaran merupakan prestasi kerja masih melekat pada sebagian pengelola anggaran pembangunan pendidikan. Sementara itu, capaian indikator kinerja sebagai bukti keberhasilan pembangunan

pendidikan belum menjadi tujuan utama. Karena itu, kualitas pemantauan dan evaluasi program dalam kurun waktu lima tahun ke depan juga perlu ditingkatkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah selama periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No.	Masalah Pokok	No.	Masalah
1	2	3	4
1	REVITALISASI SMK	1	TATA KELOLAH KELEMBAGAAN
		2	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		3	KURIKULUM SMK
2	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4	KERJASAMA DU/ DI
		1	KURANGNYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
		2	BELUM TERPETAKAN/ TERDISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SESUAI KEBUTUHAN PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN
3	SARANA PRASARANA SMA, SMK DAN SLB	3	KURANGNYA PEMBINAAN SDM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		1	BELUM MAKSIMALNYA SAPRAS UTAMA DI SATUAN PENDIDIKAN
		2	BELUM MAKSIMALNYA SAPRAS PENDUKUNG DI SATUAN PENDIDIKAN
4	PEMAJUAN KEBUDAYAAN	3	BELUM MAKSIMALNYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN DI SATUAN PENDIDIKAN
		1	MASIH BANYAK CAGAR BUDAYA YANG BELUM DITETAPKAN PERINGKATNYA BAIK TKT. KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL
		2	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA SENI BUDAYA
5	REFORMASI BIROKRASI	3	KURANGNYA PEMBINAAN PELAKU SENI BUDAYA DIMASYARAKAT
		1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BELUM MENYESUAIKAN DENGAN STRUKTUR KEMENTERIAN TEKNIS
		2	BELUM TERAKOMODIRNYA BIDANG KEBUDAYAAN DAN BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS PADA TUSI CABANG DINAS
		3	KURANGNYA PEMBINAAN SDM APARATUR

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

- Untuk Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
- Sebagai acuan bagi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebagai acuan dalam penetapan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah
- Serta Mengukur Tujuan dan Sasaran dari Program Kegiatan yang dijalankan setiap Tahunnya.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	69.65	73.61	77.01	81.48	84.88	91.94
		Meningkatkan Akses, Mutu Serta Tata Kelola Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	Nilai Mutu Pendidikan SMA		55,73	54,02	54,03	54,04	54,05
			Nilai Mutu Pendidikan SMK		50,83	50,39	50,40	50,41	50,42
			Nilai Mutu Pendidikan SLB		46,46	53,84	53,85	53,86	53,87
			Nilai APS USIA 16-18		76,32	75,84	75,85	75,86	75,87

3.4. Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai kegiatan yang dihimpun dalam satu bentuk perencanaan berdasarkan potensi yang tersedia. Penetapan program dilakukan berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi serta kebijakan yang diharapkan akan terwujud.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui program jangka pendek (Renja) serta program jangka menengah (RPJMD) yang di break down dalam bentuk Program dan kegiatan Tahun 2023 tertera pada Tabel 3.1 yaitu :

TABEL 3.1.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUTE		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
I. DINAS					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta
1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya SMA yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.18 Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Terlaksananya SMA yang Terpenuhi Pembangunan Ruang/Sudut Baca	20 Unit			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya SMA yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Unit			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya SMA yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terlaksananya SMA yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.41 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Terlaksananya SMA yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.42 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya SMA yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	31 Sekolah			Sarana Prasarana SMA
1.01.02.1.01.48 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1 Kegiatan			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade,	500 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
	olahraga				
1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pendidik dan Tenaga kependidikan	611 PTK			PTK SMA
1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Tersedianya sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Sekolah Menengah Atas yang tersalurkan Dana Bos	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta
1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Terlaksananya SMK yang Terpenuhi Pembangunan Ruang Praktik Siswa	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya SMK yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya SMK yang Terpenuhi Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terlaksananya SMK yang Terpenuhi Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Terlaksananya SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya SMK yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25 Sekolah			Sarana Prasarana SMK
1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya SMK yang Terpenuhinya Biaya Personil Peserta Didik SMK Yang Putus Sekolah dan Tidak Mampu (Pemenuhan SPM)	5400			Peserta Didik SMK Yang Putus Sekolah dan Tidak Mampu
1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SMK	185 Sekolah			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terlaksananya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Sekolah Menengah Kejuruan yang tersalurkan Dana Bos	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta
1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah SLB yang Terpenuhi Rehabilitasi Sarana, Prasarana	5 Sekolah			Sarana Prasarana SLB



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
Sekolah	dan Utilitas Sekolah				
1.01.02.1.03.36 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	2 Kegiatan			Sarana Prasarana SLB
1.01.02.1.03.42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
1.01.02.1.03.45 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SLB yang Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terimplementasinya kurikulum pembelajaran secara maksimal pada Satuan Pendidikan SLB	30 Sekolah			Peserta Didik SLB dan PTK SLB
1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Sarana Prasarana SLB
1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	330			Peserta Didik SLB dan PTK SLB
1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SLB	94 Orang			PTK SLB
1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Sekolah Pendidikan Khusus yang tersalurkan Dana Bos	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Terlaksananya Pemenuhan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus (%)	100%			
1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100%	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
1.01.03.1.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			Peserta Didik SMA, SMK dan PTK SMA, SMK
1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	2 Kegiatan			PTK SMA, SMK
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100%			
1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan distribusi PTK	2 Dokumen	Terpenuhinya Pemerataan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Kegiatan			PTK Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Kegiatan			PTK Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pengendalian Perizinan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat	100%			
1.01.05.1.01.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Sekolah Swasta pada jenjang Pendidikan Menengah Yang Diterbitkan	30 Izin Sekolah Swasta pada jenjang Pendidikan Menengah	Terlaksananya Penerbitan Izin Sekolah Swasta pada jenjang Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	Sekolah Swasta Pada Jenjang Pendidikan Menengah
1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Kegiatan			Satuan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Terlaksananya Pengembangan Bahasa Dan Sastra Daerah	100%			
1.01.06.1.01.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan	2 Bahasa dan Sastra Daerah Pembinaan, Pengembangan	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah	100%	Bahasa dan Sastra daerah kewenangan provinsi
1.01.06.1.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 13 Kabupaten/ Kota
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%			Peningkatan Pengembangan Budaya Sulawesi Tengah
2.22.02.1.01.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	2 kegiatan	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Budaya untuk Perkuatan Karakter Bangsa	100%	Komunitas Kebudayaan
2.22.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2 Kegiatan			Pelaku Kebudayaan
2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2 Kegiatan			Pelaku Kebudayaan
2.22.02.1.02.01 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	2 kegiatan Pelestarian	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pelestarian Kesenian Tradisional untuk Perkuatan Karakter Bangsa	100%	Komunitas Seni
2.22.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian



RENCANA KERJA (RENJA) OPD

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
2.22.02.1.02.03 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	2 Lembaga Adat	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Lembaga Adat untuk Perkuatan Karakter Bangsa	100%	Lembaga adat
2.22.02.1.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	2 Kegiatan			Lembaga Adat
2.22.02.1.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2 Kegiatan			Lembaga Adat
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%			Peningkatan Kesenian Tradisional Sulawesi Tengah
2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Kesenian	2 kegiatan	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pelestarian Kesenian Tradisional untuk Perkuatan Karakter Bangsa	100%	Komunitas Seni
2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	100%			Peningkatan Pembinaan Sejarahh Sulawesi Tengah
2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal	2 kegiatan	Meningkatnya Apresiasi Masyarakat kepada Sejarah Daerah	100%	Komunitas Sejarah 13 Kab/ Kota
2.22.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	2 Kegiatan			Pelaku Sejarah
2.22.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	2 Kegiatan			Masyarakat dan Pelaku Sejarah
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%			Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Sulawesi Tengah
2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah kegiatan Penetapan Cagar Budaya	2 kegiatan	Persentase Bertambahnya Benda Situs dan Cagar Budaya	100%	Cagar Budaya
2.22.05.1.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
2.22.05.1.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya	2 kegiatan	Persentase Bertambahnya Benda Situs dan Cagar Budaya	100%	Cagar Budaya
2.22.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota



RENCANA KERJA (RENJA) OPD

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah	2 kegiatan	Persentase Bertambahnya Benda Situs dan Cagar Budaya	100%	Cagar Budaya
2.22.05.1.03.02 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	2 Kegiatan			Cagar Budaya 13 Kabupaten/ Kota
X					
X.XX					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	100%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji Pegawai yang di Bayarkan	5300 Orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen BMD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	422 Sekolah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Sekolah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	10 Kegiatan	Tersedianya layanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Kegiatan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II. UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM					
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%			Peningkatan Kesenian Tradisional Sulawesi Tengah
<i>2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan Pembinaan Kesenian</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pelestarian Kesenian Tradisional untuk Perkuatan Karakter Bangsa</i>	<i>100%</i>	<i>Komunitas Seni</i>
2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2 Kegiatan			Pelaku Kesenian
2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	50 Siswa			Pelaku Kesenian
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	100%			Peningkatan Pengelolaan Permuseuman
<i>2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>Terlaksananya Pengelolaan Museum</i>	<i>100%</i>	<i>Museum</i>
2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	5 Orang			Museum
2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	7 Kegiatan			Museum
X					
X.XX					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
<i>X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>	<i>100%</i>	<i>UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM</i>
X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kegiatan			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kegiatan			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%	UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	10 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100%	UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Kegiatan			UPT. TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM
III. CABANG DINAS WILAYAH I					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah I
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga	2497 Siswa			Peserta Didik SMA dan PTK SMA
1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	304 Orang			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah I (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah I
1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah pembinaan, pengembangan prestasi dibidang sains, dan seni olimpiade, olahraga, sains, dan seni	2035			Peserta Didik SMK dan PTK SMK
1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Guru SMK	304			PTK SMK
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan Menengah Kejuruan				Kejuruan
X					
X.XX					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH I	100%			CABANG DINAS WILAYAH I
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	12 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH I
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	28 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH I	100%	CABANG DINAS WILAYAH I
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH I
IV. CABANG DINAS WILAYAH II					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah II	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah II
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah II	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah II
1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah II (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah II
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
X					
X.XX					



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUTE		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH II	100%			CABANG DINAS WILAYAH II
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	100%	CABANG DINAS WILAYAH II
X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH II
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	2 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	100%	CABANG DINAS WILAYAH II
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH II
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	2 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH II	100%	CABANG DINAS WILAYAH II
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH II
V. CABANG DINAS WILAYAH III					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah III	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah III
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah III (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah III	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah III
1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah III (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah III (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah III
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
X					



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
X.XX					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH III	100%			CABANG DINAS WILAYAH III
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III
X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH III
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	20 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH III
X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH III	100%	CABANG DINAS WILAYAH III
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH III
VI. CABANG DINAS WILAYAH IV					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah IV	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah IV
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah IV	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah IV
1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah IV (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah IV
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan Menengah Kejuruan				Kejuruan
X					
X.XX					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH IV	100%			CABANG DINAS WILAYAH IV
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV
X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH IV
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	2 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH IV	100%	CABANG DINAS WILAYAH IV
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH IV
VII. CABANG DINAS WILAYAH V					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah V	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah V
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah V	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah V
1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah V (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah V
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
X					
X.XX					



PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUT		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH V	100%			CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	2 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	2 Kegiatan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	2 Kegiatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH V	100%	CABANG DINAS WILAYAH V
X.XX.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH V
VIII. CABANG DINAS WILAYAH VI					
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah VI	100%			Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah VI
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Persentase SMA Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah VI	100%	Jenjang Pendidikan SMA baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah VI
1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya sekolah yang mendapat Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	227 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Atas



RENCANA KERJA (RENJA) OPD

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTPUTE		OUTCOME		SASARAN (PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN)
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan (%) di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Persentase SMK Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Jenjang Pendidikan SMK baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah VI
1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	185 Sekolah			Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Terlaksananya Pemenuhan SPM dan 8 SNP Pada Jenjang Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Persentase SLB Yang Memenuhi SPM dan 8 SNP di Cabang Dinas Wilayah VI (%)	100%	Jenjang Pendidikan Khusus baik Negeri dan Swasta di Cabang Dinas Wilayah VI
1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Manajemen Pengelolaan Pendidikan Khusus	30 Sekolah			Satuan Pendidikan Khusus
X					
X.XX					
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terlaksananya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PADA KANTOR CABANG DINAS WILAYAH VI	100%			CABANG DINAS WILAYAH VI
X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
X.XX.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH VI
X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	4 Kegiatan	Tersedianya layanan administrasi umum perkantoran di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH VI
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH VI
X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	2 Kegiatan	Tersedianya layanan jasa Penunjang di Lingkungan CABANG DINAS WILAYAH VI	100%	CABANG DINAS WILAYAH VI
X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Kegiatan			CABANG DINAS WILAYAH VI



4 PENUTUP

Demikian rencana kerja (Renja-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini di susun sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang di rancang sebagai upaya untuk menawarkan program.

Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara detail diuraikan dalam Visi dan Misi organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tujuan dan strategi yang akan dicapai serta implementasi pelaksanaan program dan berbagai tindak kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dimaksud.

Selanjutnya penyusunan Renja-OPD pada dasarnya sangat bermakna bagi Rencana Tindakan pelaksanaan tugas dan fungsi secara sistematis, transparan dan Akuntabel, terstruktur sehingga dapat mengevaluasi dan mengoreksi beban tugas dan fungsi yang belum maksimal. Disamping itu patokan kinerja yang diharapkan dengan mudah dapat diklasifikasikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan untuk masa akan datang.

Demikian dokumen ini dibuat, Insya Allah kami dapat melakukan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan.

Palu, Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M. Kes

NIP. 196707121990032013

